



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADLISMAN
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 162394

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.315.000.000**

1. Tanah Seluas 800 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/90 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 62.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2.000 m2/280 m2 di KAB / KOTA DHARMASRAYA, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 307.600.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 400.000
3. MOTOR, HONDA PCX SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS GR SPORT 2021 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 421.500.000**

D. SURAT BERTHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 227.475.790**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 2.271.575.790**



III. HUTANG

Rp. 658.455.773

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.613.120.017

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.